MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar :
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di Bawahnya.

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	13 Agustus 2026
Pukul	:	15.00 WITA s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara	:	Rapat Internal Hakim
Peserta Rapat	:	Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua PTUN Kupang, dan Para Hakim

Pembahasan Rapat:

I. HAWASBID

Temuan Umum dan Keuangan:

- Para ruang hakim dudukan closet lepas dan flush tidak jalan;
- Tangga pembina upacara diletakkan di kamar mandi satpam;
- Wastafel toilet lantai 1 laki-laki bocor;
- Pengelompokan SPM hanya diurutkan saja berdasarkan bulan, sementara yang diperlukan adalah berdasarkan kelompok-kelompok belanja modal dan belanja pegawai.

Temuan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana:

- Format formulir izin keluar kantor untuk hakim belum sesuai Perma 7/2016;
- Beberapa pegawai penilaian PCK belum menyerahkan kepada kepegawaian, sehingga menjadi tidak lengkap;
- Dokumen pensiun Joseph Klau belum dibuat.

Temuan Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan:

- Kabel di ruang server berantakan;
- Kunci ruang server rusak belum diperbaiki, jika ada anggaran agar dibuat geometric;

- Kaca jendela ruang server perlu dilapisi kaca film guna menghindari sinar matahari langsung;
- Website PPID PTUN Kupang belum memuat SK PPID.

Kepaniteraan Muda Hukum:

- Berkas perkara inaktif nomor 16/G/2026/PTUN.KPG dalam SIPP tercatat nomor boks 792 dan nomor arsip 1054. Namun tersimpan dalam ruang arsip dengan nomor boks 747 dan nomor arsip 1009;
- Berkas perkara inaktif nomor 23/G/2025/PTUN.KPG dalam SIPP tercatat nomor boks 754 dan nomor arsip 1016. Namun tersimpan dalam ruang arsip dengan nomor boks 709 dan nomor arsip 971.

Kepaniteraan Muda Perkara:

- Berkas perkara banding nomor 39/G/2025/PTUN.KPG dan kasasi nomor 35/G/2025/PTUN.KPG dan 36/G/2025/PTUN.KPG belum dikirim;
- Perkara no 25/G/2026/PTUN.KPG transaksi pnbp panggilan pertama belum dicatat padahal sudah dilakukan;
- Perkara no 27/G/2026/PTUN.KPG transaksi dan pencatatan panggilan pihak ketiga dan pnbp belum dicatat, karena terkendala terkait kwitansi dr JSP.

Catatan tambahan:

- Penyerahan laporan Hawasbid, dibarengi dengan penyerahan TLHP kepada Wakil Ketua PTUN Kupang.
- Monev PTSP dilakukan per 3 bulan, tetapi laporan dari Hawasbid tetap 1 bulan sekali.

II. PERSIDANGAN

- Tanggung jawab minutasi ada pada Majelis Hakim sejak berkas perkara diserahkan dari Kepaniteraan Muda Perkara kepada Majelis Hakim yang kemudian "dititipkan" kepada panitera pengganti.
- Selama ini, proses minutasi terkendala banyak hal, maka berpengaruh pada proses selanjutnya seperti upaya hukum.
- Pemeriksaan berita acara jangan ditunda lama, akan lebih baik jika panitera pengganti juga mendampingi selama pemeriksaan.
- Pemeriksaan berita acara bukti surat, juga harus disertai dengan bukti suratnya untuk diperiksa.
- Persiapkan bahan rapat administrasi persidangan dengan kepaniteraan.

III. DISIPLIN HAKIM

- Tim SOP, SPIP, Media Sosial dan lain-lain agar melakukan rapat dengan tim lainnya agar proses penyelesaian berjalan dengan efektif.
- Masing-masing ketua area ZI agar mempersiapkan monev-monev apa yang harus dilakukan seperti jenis monev dan berapa kali

dilakukan dalam setiap tahunnya untuk memenuhi eviden pada area tersebut.

- Masing-masing area ZI persiapkan rencana kegiatan per bulannya beserta outputnya.

Catatan tambahan:

- Apabila terdapat dana pemeriksaan PS yang lebih (SBM yang tersisa), agar dapat menyumbangkan ke dalam dana taktis hakim. PS dalam kota Rp50.000-Rp100.000 dan luar kota Rp100.000-Rp300.000.

	Mengetahui,
Notulis	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
	Ketua
PUTU CARINA SARI DEVI, S.H.	**Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**
NIP. 199812292022032013	NIP. 197808172003121001